BAB V
PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PDRB dan Pembiayaan Perbankan Syariah Provinsi Jawa Timur

1. Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur dalam penelitian ini didapatkan berdasarkan pendekatan produksi dengan cara menjumlahkan Nilai Tambah Bruto (NTB) dari seluruh proses produksi atas barang maupun jasa. Dalam penghitungannya, NTB sama dengan output (tingkat produksi) bersih, yakni output bruto dikurangi semua pengeluaran yang berhubungan dengan proses produksi, di mana total nilai pengeluaran tersebut disebut sebagai konsumsi antara (dahulu dikenal sebagai biaya antara). Adapun metode penilaian output menggunakan harga produsen, yakni tingkat harga sebelum terjadi atau dimasukkannya biaya pengiriman melalui pengangkutan, dan biaya perdagangan (yang timbul pada tingkat pedagang). PDRB yang disajikan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan harga konstan tahun dasar 2000 dan 2010.

Pada periode tahun 2010 hingga 2015, Provinsi Jawa Timur menghasilkan pendapatan PDRB sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 5.1 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Sektor Ekonomi Periode 2010-2015

Periode	PDRB (dalam Juta Rupiah)			
	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
2010	238.091.501	246.971.470	255.973.755	249.612.118
2011	254.486.800	262.770.700	271.491.800	265.652.400
2012	271.008.800	280.173.700	290.115.000	283.167.200
2013	287.728.900	296.541.200	306.703.900	301.815.800
2014	305.063.800	314.062.300	325.225.800	318.345.200
2015	320.456.100	330.486.200	343.208.000	337.268.000

Sumber: BPS Jawa Timur, diolah.

Dimulai tahun 2010, PDRB Provinsi Jawa Timur pada triwulan pertama mencapai 238, 091 Triliun, dan kemudian naik pada triwulan kedua dan ketiga. Namun pada triwulan keempat turun *quarter to quarter (q to q)* dari triwulan ketiga sebesar 2,5% menjadi 249,612 Triliun. Kemudian, PDRB Provinsi Jawa Timur pada triwulan pertama tahun 2011 mencapai Rp 254,486 Triliun dan naik 3,26% pada triwulan kedua dan 3,32% pada triwulan ketiga tahun 2011. Namun pada triwulan ke empat tahun 2011, PDRB Provinsi Jawa Timur *quarter to quarter (q to q)*) mengalami penurunan sebesar 2,15% dengan nilai PDRB Rp 265,652 Triliun. Begitupun pada periode tahun 2012, triwulan pertama PDRB Jawa Timur menghasilkan Rp 271,009 Triliun, naik 6,49% *year on year* (*yoy)* dari triwulan pertama tahun 2011. Triwulan kedua tahun 2012 menghasilkan PDRB sebesar Rp 280,174 triliun dan triwulan ketiga Rp 290,115 Triliun, namun kemudian seperti tahun 2011, triwulan keempat PDRB Provinsi Jawa Timur menurun 2,39% *q to q* menjadi Rp 283,167 Triliun.

Fenomena kenaikan pada triwulan pertama, kedua, dan ketiga serta penurunan nilai PDRB pada triwulan ke empat juga terjadi pada tahun 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan 2014. Secara *yoy* PDRB triwulan keempat tahun 2013 terhadap triwulan keempat tahun 2012 naik 6,59% dengan PDRB sebesar Rp 301,816 Triliun. Sementara PDRB triwulan keempat tahun 2014 sebesar Rp 318,345%mengalami pertumbuhan negatif dari *yoy* triwulan keempat tahun 2013 sebesar 5,48%. Pada tahun 2015, PDRB triwulan pertama sebesar Rp 320,456 Triliun, kemudian naik Rp 330.486 Triliun pada triwulan kedua, sementara triwulan ketiga secara *q to q* juga naik Rp 343,208 Triliun, sedngkan pada trwulan keempat turun *q to q* 1,73% dengan PDRB sebesar 337,268%. Namun demikian, dibandingkan *yoy* triwulan tahun keempat tahun 2014, pertumbuhan PDRB triwulan keempat tahun 2015 naik 5,94%.

Grafik 5.1 Nilai Produk Domestik Regional Bruto menurut Sektor Ekonomi Provinsi Jawa Timur berdasarkan Harga Konstan

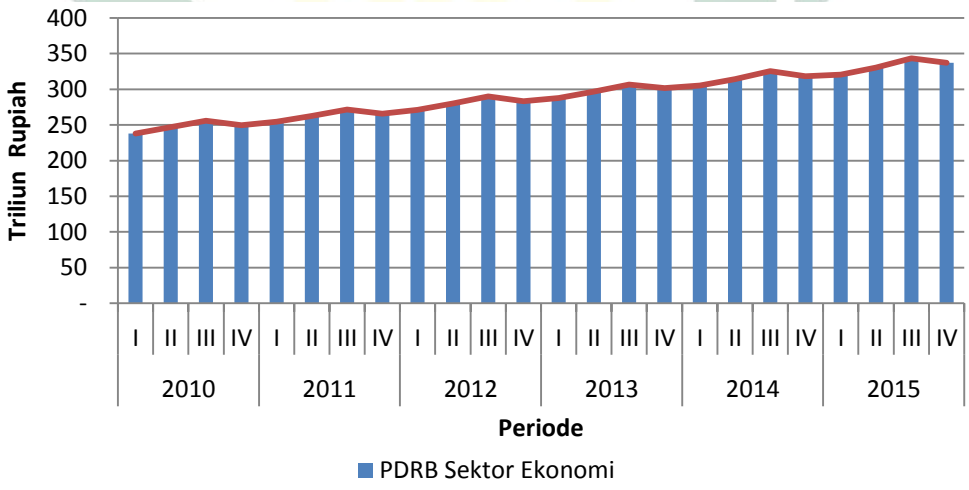

Berdasarkan grafik di atas, tampak bahwa nilai PDRB di Provinsi Jawa Timur secara umum *yoy* cenderung mengalami kenaikan meskipun tidak secara signifikan. Namun jika dilihat per triwulan, triwulan pertama hingga ketiga cenderung mengalami kenaikan, sementara triwulan ke empat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya pada setiap tahun. Ini menunjukkan bahwa nilai PDRB yang dihasilkan oleh Provinsi Jawa Timur bersifat musiman. Hal ini sangat dipengaruhi oleh musim tanam dan panen pada beberapa komoditi dalam kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto menurut sektor ekonomi atau lapangan usaha yang terbentuk dari dari komponen 17 kategori lapangan usaha yang kemudian dikelompokkan ke dalam 9 kategori besar sektor ekonomi sesuai dengan definisi dan kriteria dari Badan Pusat Statistik. Yaitu: 1) pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan; 2) pertambangan dan penggalian; 3) industri pengolahan; 4) listrik, gas, dan air; 5) konstruksi; 6) perdagangan, hotel, dan restoran; 7) transportasi, pergudangan, dan komunikasi; 8) keuangan, *real estate*, dan jasa perusahaan; dan 9) jasa-jasa lainnya.

Grafik 5.2 Proporsi PDRB Menurut Sektor Ekonomi Provinsi Jawa Timur

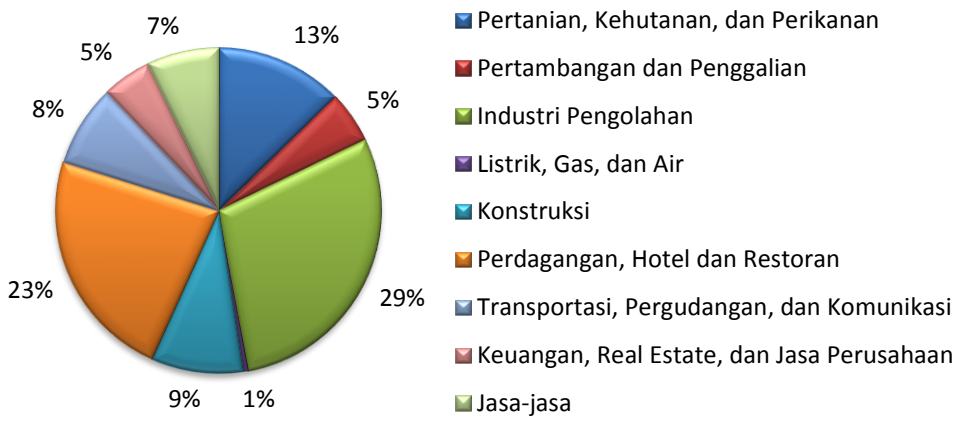

Keterangan: Proporsi dihitung berdasarkan nilai rata-rata PDRB Provinsi Jawa timur tahun 2010-2015. Sumber, BPS, diolah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan grafik diatas, yang dihitung dari rata-rata PDRB sektoral tahun 2010-2015, tampak bahwa proporsi PDRB Jawa Timur paling besar adalah sektor industri pengolahan sebesar 29% dengan nilai PDRB rata-rata Rp 84,85 Triliun. Kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang menyumbang proporsi 23% dengan rata-rata nilai Rp 66,92 Triliun. Sektor ketiga terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan proporsi 13% dan rata-rata PDRB Rp 36,91 Triliun.

Sektor Nawacita sebagaimana digambarkan oleh grafik di atas, memiliki proporsi yang cukup besar, teruatama sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, kehutanan dan pertanian. Sementara sektor konstruksi menyumbang komposisi PDRB Jawa Timur sebesar 9%, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian hanya 5%.

2. ***Influential Component*: Pembiayaan Sektor Ekonomi Provinsi Jawa Timur**

Influential component atau komponen yang berpengaruh terhadap PDRB dalam penelitian ini adalah varabel bebas yang dibentuk oleh pembiayaan sektor ekonomi. Kegiatan produksi, investasi, dan konsumsi oleh masyarakat dan pemerintah pada umumnya membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan tersebut. Semakin tinggi aktivitas ekonomi suatu daerah, maka kebutuhan akan pembiayaan semakin besar. Dalam kondisi ini peranan pembiayaan oleh perbankan menjadi sangat penting bagi keberlanjutan usaha masyarakat dan pemerintah. Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi sangat berperan dalam kegaiatan pembiayaan ini. Dana yang diperlukan bagi aktivitas ekonomi dalam hal ini adalah pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbankan syariah dapat disebut juga sebagai faktor produksi yang sejajar dengan faktor-faktor produksi yang lain seperti tenaga kerja, peralatan mesin-mesin, bahan baku/bahan penolong, kemampuan teknologi dan manajemen sebagai suatu sumber ekonomi yang langka.

Pembiayaan sektor ekonomi/ lapangan usaha pada triwulan pertama tahun 2010 hanya mendapatkan *share* 33% dari total pembiayaan. Pada tahun 2010, dominasi pembiayaan diberikan kepada debtur pembiayaan konsumtif. Namun, mulai tahun 2011, lebih dari separuh total pembiayaan dialkasikan untuk sektor lapangan usaha. Tentunya ini menunjukkan bahwa perbankan syariah di Provinsi Jawa Timur lebih pro terhadap pembangunan ekonomi. Bahkan, pada triwulan ke IV tahun 2015, *share* pembiayaan sektor ekonomi sudah mencapai porsi 64% dengan pembiayaan sebesar Rp 13 Triliun.

Grafik 5.3 *Share* Pembiayaan Lapangan Usaha

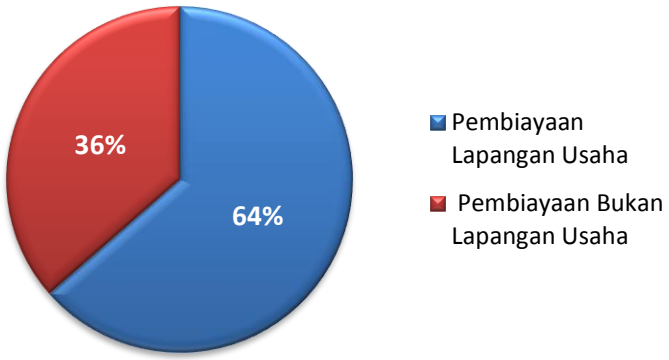

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proporsi pembiayaan oleh perbankan syariah di Jawa Timur menurut sektor adalah sebagai berikut:

Grafik 5.4 Proporsi Pembiayaan oleh perbankan Syariah di Jawa Timur Menurut Sektor

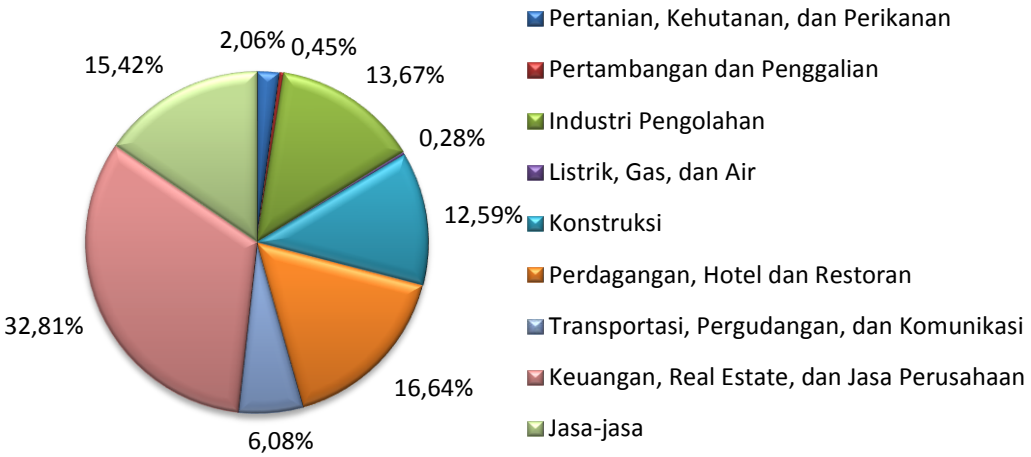

Keterangan: Proporsi dihitung berdasarkan nilai rata-rata pembiayaan oleh perbankan syariah Provinsi Jawa timur tahun 2010-2015. Sumber, Bank Indoneisa, diolah.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan memiliki proporsi terbesar dalam penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah di Provinsi Jawa Timur sebesar 32,81%. Rata-rata pembiayaan yang dikeluarkan untuk sektor ini mencapai Rp 2,33 Triliun. Proporsi terbesar selanjutnya adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 16,64% dengan rata-rata pembiayaan 1,18 Triliun.

Sementara itu, pembiayaan sektor ekonomi yang termasuk dalam Nawacita yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan selama 2010-2015 rata-rata menyumbang pembiayaan sebesar 2,06%. Begitupun sektor pertambangan dan penggalian yang hanya berkontribusi 0,45% pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan perbankan syariah. Di sisi lain, Sektor Nawacita memiliki proporsi cukup bagus di sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan.

Pembiayaan sektor konstruksi selama kurun waktu 2010-2015 secara rata-rata berkontribusi sebesar 12,59% terhadap total pembiayaan oleh perbankan syariah, yakni sebesar Rp 894,9 Milyar. Sedangkan industri pengolahan memiliki proporsi pembiayaan sebesar 13,67% dengan nilai PDRB rata-rata sektor ini sebesar Rp 971,9 Milyar.

Tabel 5.2 Statistik Deskriptif Pembiayaan Sektoral Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Rata-rata	Median	Standar Deviasi
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	146.675	107.270	87.603
2	Pertambangan dan Penggalian	32.129	19.837	25.382
3	Industri Pengolahan	971.863	712.969	868.079
4	Listrik, Gas, dan Air	19.918	12.179	16.930
5	Konstruksi	894.982	900.093	552.697
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.183.431	737.158	1.001.174
7	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	432.176	339.699	354.012
8	Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	2.332.532	2.380.935	1.216.355
9	Jasa-jasa	1.096.412	1.254.130	486.368

Sumber: Bank Indonesia, diolah

B. Pengaruh Pembiayaan Sektor Nawacita terhadap PDRB Sektor Ekonomi

Tujuan utama perbankan syariah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Untuk merealisasikannya, kegiatan perbankan harus terfokus pada kegiatan produksi.[1] Menurut Mankiw, kapital atau

[1] Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah...*, 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal merupakan sumber utama dalam pertumbuhan ekonomi.[2] Dengan adanya modal suatu kegiatan produksi atau usaha dapat dilakukan. Kegiatan produksi dilakukan untuk menghasilkan barang dan jasa dimana jumlah barang dan jasa akhir merupakan komponen untuk melihat tingkat PDRB. Dalam hal ini, Bank berperan penting untuk menyediakan modal melalui penyaluran pembiayaan.

Hasil uji model pengaruh pembiayaan sektor ekonomi Nawacita oleh perbankan Syariah di Jawa Timur terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan estimasi model regresi berganda menunjukan bahwa tidak seluruh sektor ekonomi di Jawa Timur signifikan dan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur secara umum.

Sektor AGRIFISH yang menguasai 13% proporsi PDRB Jawa Timur nyatanya tidak mendapatkan pengaruh yang signifikan dari kegiatan pembiayaan oleh perbankan syariah. Korelasi yang ditunjukkan pun juga negatif. Model korelasi yang negatif ini menjelaskan bahwa peningkatan pembiayaan perbankan syariah ke sektor pertanian tersebut berdampak kepada penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi, dan tentu saja, estimasi model seperti ini tidak logis berdasarkan teori ekonomi.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alatan dan Bassana, dari hasil penelitian didapatkan bahwa pertumbuhan kredit sektor pertanian berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional Jawa Timur. Hasil

[2] N. Gregory Mankiw, *Teori Makroekonomi*, ed. 5 (Jakarta: Erlangga, 2003), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini menunjukan bahwa semakin tinggi kredit pertanian yang dikucurkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.[3]

Sementara itu, hasil penelitian berbeda didapatkan Sipahutar, estimasi model *regression in difference* menjelaskan bahwa pengaruh kredit perbankan ke sektor pertanian (*AGR*) tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berkorelasi negatif.[4] Hasil ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini patut diduga sebagai akibat dari rendahnya komposisi sektor tersebut terhadap total pembiayaan yang disalurkan perbankan selama enam tahun terakhir.

Permodalan merupakan salah satu faktor produksi penting dalam usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Namun, dalam operasional usahanya tidak semua petani memiliki modal yang cukup. Dalam sub-sektor pertanian Jawa Timur yang didominasi oleh tanaman padi, jagung, kedelai, dan palawija, aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber permodalan masih sangat terbatas, terutama bagi petani-petani yang menguasai lahan sempit yang merupakan komunitas terbesar dari masyarakat pedesaan. Dengan demikian, tidak jarang ditemui bahwa kekurangan biaya merupakan kendala yang menjadi penghambat bagi petani dalam mengelola dan mengembangkan usaha tani.

---

[3] Tan S.D. Alatan dan Sautma R. Basana, "Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Ekonomi Regional Jawa Timur", *Jurnal FINESTA,* Vol. 3, No. 1, (2015), hlm. 66.

[4] Mangasa Augustinus Sipahutar, "Keterkaitan Kredit Dan Kelembagaan Perbankan Indonesia Pada Perekonomian Nasional Dan Regional", (Disertasi -- Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2016), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Padahal, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit,* dalam hal ini adalah petani. Pembiayaan ini merupakan salah satu produk *taawun* (tolong-menolong) dari pihak pemilik dana (*sahibul māl)* kepada pihak yang membutuhkan tanpa diikuti dengan hal bathil. Sebagaimana diterangkan dalam al-Quran surat *an-Nisa'* (4) ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ ...

> "Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu …"

Di Provinsi Jawa Timur, sektor AGRIFISH sub-sektor pertanian didominasi padi, jagung, dan kedelai. Sebagai daerah penghasil padi, jagung, dan kedelai terbesar nasional, Provinsi Jawa Timur memiliki sasaran pembiayaan pertanian yang luas. Terlebih pemerintah daerah juga menyiapkan 130 kelompok unit pengolahan hasil pertanian sehingga seharusnya, potensi kelompok tani yang layak dibiayai juga semakin banyak. Namun demikian, usaha-usaha tersebut rata-rata berada di pedesaan yang belum terjangkau oleh perbankan syariah, sehingga akses terhadap pembiayaan sulit. Selain itu, pemberian pembiayaan pada sektor pertanian tidaklah mudah karena banyak petani yang belum memahami mekanisme bank. Padahal, sebagian besar sektor pertanian di Jawa Timur adalah kegiatan perorangan yang belum memiliki aspek legal formal.

Risiko pertanian yang tinggi juga menjadi alasan. Sektor pertanian memiliki risiko tinggi terhadap ancaman gagal panen, karena sangat bergantung dengan kondisi alam. Di sisi lain, masalah agunan juga menjadi salah satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghambat masuknya perbankan ke petani. Banyak petani yang belum memiliki aspek legal formal. Ketidakadanya agunan menjadi risiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank semakin besar, sehingga bank cenderung menghindari pembiayaan sektor ini.

Hambatan lain yang menjadikan pembiayaan oleh perbankan syariah terhadap sektor pertanian tidak signifikan adalah belum semua bank siap dan punya prosedur operasional standar untuk terjun khusus di pembiayaan sektor pertanian, sehingga bank menjadi lebih hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. Hal ini memicu fenomena kesenjangan kompetensi pembiayaan di sektor agrikultur. Dikatakan oleh Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan I Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 3, Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Budi Susetyo, belum ada satupun bank yang memiliki standar baku penilaian kelayakan pembiayaan pertanian. Hal ini memunculkan stereorotip bahwa pembiayaan pertanian berisiko tinggi dan tidak layak dibiayai perbankan.[5]

Berbeda dari perbankan konvensional yang sudah memiliki program kredit bekerja sama dengan pemerintah Jawa Timur melalui kredit rendah bunga, selama ini program pembiayaan sektor pertanian oleh perbankan syariah yang diakomodir oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur yang masih belum ada. Padahal, biasanya petani-petani kecil di daerah sangat bergantung pada pemberian program pembiayaan lunak dari pemerintah melalui perbankan.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar petani lebih akrab dengan sumber-sumber pembiayaan informal seperti pedagang bahan

[5] Miftahul Ulum, "Kredit Pertanian Tak Dilirik', http://koran.bisnis.com/read/20160916 /445/584470/kredit-pertanian-tak-dilirik, diakses pada 16 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun tengkulak, rentenir, kelompok dan lain-lain. Sumber formal yang akrab bagi petani hanya koperasi yang lebih lunak dan fleksibel. Sumber-sumber ini "sangat mengerti" kondisi dan kebutuhan petani. Pinjaman diberikan tanpa agunan dan dengan prosedur sederhana. Realisasi dilakukan dengan cepat, dekat, tepat waktu dan jumlah sesuai kebutuhan, walaupun harus membayar dengan bunga yang lebih tinggi. Di pihak lembaga formal seperti perbankan, diterapkan standar perbankan komersial dengan prinsip kehati-hatian. Sementara di pihak petani yang memiliki banyak keterbatasan beranggapan bahwa menjadi nasabah perbankan merupakan suatu yang sulit.

Demikian pula pertanian sub-sektor peternakan. Pembiayaan sektor ini pun juga juga memiliki risiko cukup tinggi karena pembudidayaan ternak yang tidak bisa dipastikan hasilnya. Sub-sektor peternakan di Jawa Timur didominasi oleh hasil pertanian ternak berupa sapi, kambing, ayam, telur, dan susu.[6] Harga diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang mudah melonjak naik dan terjun bebas turun. Bila mendapatkan harga bagus, maka petani ternak akan menikmati kekayaan melimpah. Bila harga turun bebas maka petani mengalami kerugian yang tersangat perih. Tentunya hal ini menjadi sebuah hal *gambling* bagi penyedia pembiayaan.

Sementara itu, di sub-sektor perikanan, merunut pada data pembiayaan oleh Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, perbankan syariah di Jawa Timur rata-rata baru mulai memberikan pembiayaan untuk sub-sektor ini tahun 2014. Padahal, Jawa Timur memiliki potensi dan hasil laut yang luar biasa. Menurut

[6] Pemerintah Provinsi Jawa Timur, "Data Dinamis Perekonomian Jawa Timur: Maret 2016", 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumentasi Jaring hasil kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), kendala pembiayaan pada sub-sektor perikanan teridentifikasi sebagai berikut:

1. Sisi Perbankan
   a. Risiko strategis. Masih sedikit jumlah usaha perikanan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kemudian, mekanisme transaksi di hulu khususnya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pusat penagkaran Ikan (PPI) masih bersifat tunai dan belum tersentuh layanan perbankan.
   b. Risiko operasional. Karakteristik sektor pertanian adalah produknya bersifat mudah rusak (*perishable)* dan sikuls usaha bergantung pada faktor alam (cenderung musiman).
   c. Risiko pembiayaan dan permasalahan legalitas. Siklus usaha perikanan sangat bergantung pada alam sehingga mempengaruhi kegiatan dan kelancaran pembayaran. Kemudian, belum optimalnya pemanfaat asuransi (kerugian, pembiayaan, dan jiwa) pembiayaan sektor perikanan. Selain itu, pemenuhan persyaratan formal perbankan (aspek agunan) masih sulit didapatkan dari calon debitur. Yang terakhir, belum optimalnya monitoring pencatatan transaksi keuangan dan potensi *side streaming* dan *mark up* menjadi risiko yang harus diterima perbankan syariah jika memberikan pembiayaan kepada sektor pertanian.
2. Sisi debitur perikanan
   a. Rendahnya *bargaining power* (kekuatan penawaran) penjual dalam pemasaran produk perikanan, harga penjualan sangat tergantung oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

standar pembeli. Pelaku usaha sektor hulu sebagian besar belum memahami layanan perbankan dan startegi pemsaran.

b. Terbatasnya akses informasi. Terbatasnya akses pembiayaan ke lembaga jasa keuangan. Proses dan jenis perizinan di sektor perikanan, khususnya perikanan tangkap dinilai cukup kompleks.

Karakteristik usaha AGRIFISH yang mengandung banyak risiko menyebabkan minat lembaga pembiayaan untuk mendanai usaha sektor ini relatif rendah. Untuk mendukung pembiayaan syariah di sektor ini, hal penting yang perlu diperhatikan adalah harus ada keberpihakan yang diwujudkan dengan memberikan alokasi pembiayaan yang cukup besar untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Peran pemerintah sebagai *policy maker* cukup signifikan dalam mendukung upaya ini baik melalui peraturan atau fasilitasi informasi tentang usaha pertanian yang prospektif dimitrakan dengan model pembiayaan syariah. Melalu pemetaan risiko, mitigasi alternatif yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah ini antara lain:

1. Risiko strategis. Dapat dimitigasi dengan beberapa cara antara lain edukasi dan sosialisasi layanan perbankan secara berkelanjutan akan meningkatkan pemahaman tentang layanan perbankan dan mendukung startegi pemasaran. Selanjutnya, revitalisasi mekanisme transaksi di teknologi informasi menjadi layanan perbankan terpadu akan memperkecil risiko uang tunai termasuk mendukung budaya menabung dan pelaku usaha hulu bebas bertransaksi di mana saja, meningkatkan kemudahan pelaku saha mendapatkan fasilitas pembiayaan perbankan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

layanan tabungan, dan mendukung program pemerintah kepada pelaku usaha di hulu seperti subsidi BBM, kesehatan, dan sertifikat lahan.

2. Risiko pembiayaan. Aspek karakter: perbankan syariah perlu memperkuat tahapan penelitian karakter (*character checking*) calon debitur. Penelitian karakter dapat dilakukan melalui komunikasi dengan pihak ketiga terdekat (tetangga, RT, dan lainnya). Aspek kemampuan membayar: perlu tenaga pendamping lapangan guna meastikan produktivitas dan pemasaran terjaga guna menunjang sumber pembayaran pembiayaan debitur.
3. Risiko operasional: sistem pembayaan atau transaksi keuangan di masyarakat saat ini dilakukan secara tunai karena masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki akses ke perbankan. Selain itu, transkasi tunai cukup berisiko dari sisi keamanan dan hilangnya kesempatan memperoleh layanan perbankan. Untuk itu perlu dilakukan melalui layanan perbankan secara terpadu. Hal ini juga dapat mengantisispasi risiko uang hasil panen sebagai sumber pembayaran pembiayaan digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Keuntungan lain adanya layanan perbankan terpadu adalah mempermudah pelaksanaan dan monitoring program-program pemerintah dan pihak terkait, misalnya penyaluran pembiayaan perbankan, budaya menabung, penyaluran bantuan mesian motor, dan subsisidi pemerintah.

Dalam rangka mendukung akselerasi pembiayaan sektor AGRIFISH serta memperhatikan potensi risiko yang ada, selanjutnya perbankan syariah sebaiknya melakukan upaya sinergi dengan berbagai pihak termasuk asosiasi. Pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sektor AGRIFISH akan lebih difokuskan pada pengembangan pembiayaan kemitraan tanpa mengabaikan pendekatan pembiayaan individual maupun kelompok. Hal ini mempertimbangkan jangkauan pembiayaan kemitraan yang lebih luas dan komprehensif, kemudahan akses pembiayaan terutama oleh pelaku usaha sektor AGRIFISH segmen UMKM serta proses monitoring yang efektif dan efisien.

Sejalan dengan sembilan program prioritas Pemerintah (Nawacita) dalam mendukung pengembangan ketahanan pangan Indonesia, sebaiknya perbankan syariah di Jawa Timur bersama berbagai pihak seperti pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas terkait, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), asuransi, maupun kelompok-kelompok tani dan nelayan turut serta berperan dalam mendorong pertumbuhan pembiayaan pada sektor AGRIFISH. Dukungan yang diharapkan dari perusahaan asuransi antara lain peningkatan coverage jaminan serta produk asuransi yang disesuaikan dengan nature bisnis di sektor AGRIFISH.

Sementara itu Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dapat mendorong dan merekomendasikan para pengusaha di bidang AGRIFISH untuk menjadi mitra bisnis termasuk memunculkan pengusaha baru di sektor ini. Ke depan diharapkan peran KADIN dapat ditingkatkan dengan memberikan penyuluhan terhadap nelayan yang belum bankable untuk dibina menjadi bankable sehingga selanjutnya dapat direkomendasikan kepada perbankan syariah untuk memperoleh pembiayaan. Selain itu, perlu dilakukan inisiasi pengembangan bisnis sektor AGRIFISH melalui peningkatan kompetensi SDM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bekerja di perbankan syariah sehingga ketika terdapat pengajuan pembiayaan sektor ini, perbankan syariah bisa menilai dengan cermat dan baik serta bisa memonitor sesuai keahlian yang dimiliki.

Hal yang sedikit berbeda ditunjukkan oleh pembiayaan sektor pertambangan (MINING) terhadap PDRB sektor ekonomi secara umum. Pembiayaan sektor MINING berkorelasi positif namun tidak berpengaruh secara signfikan terhadap pembentukan PDRB Provinsi Jawa Timur dan keragaman (*variance*/*standard error*) koefisiennya adalah yang paling tinggi dibandingkan keragaman koefisien sektor lain.

Di Jawa Timur, terdapat usaha pertambangan antara lain pertambangan Blok Cepu, salah satu penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia, ditambang di Bojonegoro, pasir besi di Lumajang, marmer di Jawa Timur, batu gamping sebagai bahan semen yang ada di sebagian besar Kabupaten, dan lain-lain. Namun umumnya, kegiatan pertamabangan di Jawa Timur adalah usaha korporasi.

Pembiayaan perbankan ke sektor pertambangan relatif kecil karena pada umumnya, perbankan syariah mengutaakan pemberian pembiayaan pada skala usaha kecil dan menengah di sektor pertambangan, sedangkan bisnis pertambangan pada umumnya berskala korporat yang kepemilikannya didominasi oleh perusahaan asing sehingga cenderung menggunakan pasar modal dan *off-shore loan* sebagai lembaga intermediasi.

Selain itu, dalam penelitian sebelumnya oleh Alatan dan Bassana, bahwa pertumbuhan kredit sektor pertambangan tidak berpengaruh signifikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertumbuhan ekonomi regional Jawa Timur. Hal ini disebabkan sektor pertambangan memiliki risiko yang tinggi serta sejak akhir tahun 2012, lembaga perbankan di Indonesia mengurangi kucuran dana kredit terhadap sektor pertambangan. Hal tersebut dilakukan karena harga batu bara mengalami penurunan, serta adanya kebijakan pemerintah yang membatasi ekspor melalui undang-undang pertambangan mineral dan batu bara.[7] Dalam penelitian lain, sektor pertambangan merupakan sektor terkecil yang menimbulkan efek penggandaan, karena sektor pertambangan merupakan sektor yang membutuhkan modal besar dan resiko yang tinggi.[8]

Kedua hal di atas menjelaskan bahwa perbankan syariah belum menjadikan kedua sektor tersebut sebagai sumber bagi pertumbuhan performa bisnis perbankan (*bank view*). Di samping itu, baik pengelolaan sektor pertanian yang cenderung ke *on-farm agriculture* dan sektor pertambangan yang cenderung pada *small scale mining*, maka perbankan tidak terlalu *attractive* dalam pembiayaan karena selain dianggap kurang *profitable*, juga karena risiko pembiayaannya cukup tinggi. Oleh karena itu, *linkages* antara *small scale business* yang beroperasi di sektor pertanian dan pertambangan dengan *medium and large enterprises* perlu mendapat perhatian serius sehingga membentuk rantai ekonomi yang kuat dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Dengan demikian maka interaksi bisnis plasma-inti yang terbentuk akan meminimalisir risiko di sektor

---

[7] Tan S.D. Alatan dan Sautma R. Basana, "Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Ekonomi Regional Jawa Timur", *Jurnal FINESTA,* Vol. 3, No. 1, (2015), hlm. 66.

[8] Ukar Wijaya Soelistijo, dkk, "Peranan Subsektor Pertambangan Mineral", (2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanian dan pertambangan, yang pada akhirnya menjadikan kedua sektor tersebut menjadi *attractive* bagi perbankan.

Sinyal bahwa perbankan syariah tidak terlalu ekspansif dalam rangka pemberian pembiayaan ke sektor pertanian dan pertambangan dapat dijelaskan dari rendahnya portofolio pembiayaan kepada kedua sektor tersebut. Rata-rata komposisi pembiayaan ke sektor pertanian dan pertambangan terhadap total pembiayaan perbankan syariah hanya 2,06% dan 0,45% selama enam tahun (2010-2015). Rendahya komposisi pembiayaan perbankan syariah kepada kedua sektor ekonomi tersebut perlu mendapat perhatian dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar perbankan sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan perannya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur melalui sektor pertanian dan pertambangan.

Berbeda dari dua sektor di atas, pembiayaan sektor industri pengolahan dan konstruksi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan teori Mankiw yang menyebutkan bahwa kapital atau modal merupakan sumber utama dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya modal suatu kegiatan produksi atau usaha dapat dilakukan. Kegiatan produksi dilakukan untuk menghasilkan barang dan jasa dimana jumlah barang dan jasa akhir merupakan komponen untuk melihat tingkat PDRB.

Industri pengolahan merupakan sektor dengan penyumbang PDRB terbesar di Jawa Timur. Hal ini nyata bahwa memang di Jawa Timur merupakan salah satu sentra industri pengolahan di Indonesia, antara lain di Surabaya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo, Pasuruan. 13,67% pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah dari keseluruhan total pembiayaan menunjukkan bahwa perbankan syariah di Jawa Timur pro dengan industri pengolahan.

Hal ini disebabkan sektor industri pengolahan tidak lepas dari peran industri kecil dan menengah. Industri kecil dan menengah memberikan kontribusi penting kepada pertumbuhan ekonomi. Ini sejalan dengan misi perbankan syariah yang lebih mengutamakan pembiayaan kepada UMKM, sementara industri pengolahan di Jawa Timur memang didominasi oleh UMKM. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari, bahwa industri pengolahan merupakan sektor primadona Indonesia.[9]

Peran sektor industri terhadap sektor-sektor lain dalam pembangunan sangat besar. Oleh karena itu industri sering disebut juga sebagai *leading sector*. *Leading sector* tersebut nampak pada saat terjadi pertumbuhan industri yang pesat dimana akan merangsang pertumbuhan sektor lain seperti pertanian dan jasa. Hal ini disebabkan sektor industri pengolahan tidak lepas dari peran industri kecil dan menengah. Industri kecil dan menengah memberikan kontribusi penting kepada pertumbuhan ekonomi.

Sektor industri di Jawa Timur didominasi oleh industri padat tenaga kerja karena memiliki mata rantai relatif pendek, sehingga penciptaan nilai tambah juga relatif kecil. Karena besarnya populasi unit usaha ini maka kontribusinya terhadap perekonomian menjadi sangat besar. Akan tetapi diakui saat ini telah

[9] Widita Kurniasari, "Analisis Pengaruh Kredit Perbankan Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia : Analisis Sektoral Tahun 2002 – 2008", (Tesis– Universitas Indonesia, Depok, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi pergeseran ke industri padat modal dan teknologi. Untuk itu diperlukan peningkatan daya saing para pelaku industri nasional melalui revitalisasi sektor industri, peningkatan daya dukung iptek, infrastruktur, energi, serta pembangunan sektor pertanian sebagai penyedia bahan.

Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang berperan penting pada proses pembangunan ekonomi di Jawa Timur, mengingat sektor ini mampu berkontribusi pada PDRB hingga 9%. Pembiayaan konstruksi di Jawa Timur didominasi oleh pembiayaan perumahan. Tingginya permintaan terhadap pembiayaan perumahan ini disambut baik oleh perbankan syariah dengan menghadirkan variasi-variasi pembiayaan yang *attractive.* Pembiayaan yang dialokasikan oleh perbankan kepada sektor ini juga cukup besar yakni mencapai 12,59% dengan rata-rata pembiayaan per tahun Rp 895 milyar.

Dari sudut pandang bisnis, sektor konstruksi diperkirakan masih bisa eksis di tengah krisis karena pembangunan infrastruktur di jawa Timur tetap akan terus berjalan. Pembangunan infrastruktur akan terus digiatkan mengingat masih banyak fasilitas serta infrastruktur publik yang belum tersedia ataupun kurang baik kondisinya. Selain itu, permintaan terhadap perumahan juga terus meningkat sehingga menjadi peluang yang bagus bagi perbankan. Berdasarkan data Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, sektor konstruksi di Jawa Timur yang terdaftar saat ini mencapai lebih 12.000 badan usaha.[10]

Meskipun pengaruh pembiayaan sektor konstruksi terhadap PDRB Jawa Timur positif dan signifikan, namun peningkatan pertumbuhan sektor konstruksi

[10]Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, "badan Usaha LPJK", http://lpjk.net/statistik-1-badan-usaha-lpjk.html, diakses pada 17 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap harus menjadi perhatian perbankan syariah maupun pihak terkait seperti Bank Indonesia dan pemerintah. Salah satu cara adalah dengan memperhatikan tingkat efisiensi sektor konstruksi yang dapat berujung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam memajukan sektor ini. Dengan demikian pengembangan sektor konstruksi menjadi salah satu *issue* yang cukup penting untuk menggerakkan perekonomian Jawa Timur.

Berdasarkan model pembiayaan sektor Nawacita terhadap PDRB Jawa Timur dengan hasil di atas, mengimplikasikan bahwa meskipun terdapat pengaruh negatif pembiayaan sektor pertanian dan tidak signifikannya pembiayaan sektor pertambangan terhadap PDRB Jawa Timur, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa komposisi pembiayaan sektor pertanian dan pembiayaan sektor pertambangan terhadap total pembiayaan perbankan tidak cukup kuat untuk memberikan kontribusi terhadap PDRB, namun dengan bantuan pembiayaan sektor industri pengolahan dan konstruksi, maka pembiayaan sektor Nawacita berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB. Dibutuhkan komposisi pembiayaan sektor pertanian dan pembiayaan sektor pertambangan yang lebih besar agar kontribusinya signifikan terhadap PDRB.

C. Pengaruh Pembiayaan Sektor Nawacita secara Sektor per Sektor terhadap PDRB Sektor Ekonomi Nawacita

1. Pembiayaan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (AGRIFISH) terhadap PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (AGRIFISH)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil uji pengaruh pembiayaan sektor AGRIFISH terhadap PDRB sektor AGRIFISH di Jawa Timur menunjukkan pengaruh yang positif namun tidak signifikan. Hal ini sesuai dengan fakta di lapangan bahwa pembiayaan yang dikeluarkan oleh perbankan syariah di Jawa Timur untuk sektor ini hanya 2,06% dari total pembiayaan, yakni rata-rata selama 2010-2015 sebesar Rp 146,7 milyar. Pemberian pembiayaan pada sektor AGRIFISH tidaklah mudah karena risiko yang cukup tinggi, yakni adanya gagal panen serta sangat bergantung pada kondisi alam. Selain itu, kecilnya pembiayaan yang dialokasikan antara lain disebabkan oleh:

- Masih banyaknya petani yang belum *bankable.* Dan kurangnya akses petani dalam perbankan syariah, baik akses informasi maupun lokasi. Selain karena kurangnya edukasi tentang bank syariah, lokasi petani yang di desa seringkali belum terjangkau oleh perbankan syariah.
- Adanya persyaratan legal-formal seperti harus adanya agunan yang sebagian besar petani tidak memilikinya.
- Bank syariah yang memiliki kemampuan analisis dan dan sumber daya pegawai yang mampu masuk ke sektor pertanian masih belum banyak.
- Petani cenderung memilih institusi keuangan non-formal untuk mengakses permodaan seperti pinjam ke rentenir, tengkulak, dan sebagainya.

2. Pembiayaan Sektor Pertambangan terhadap PDRB sektor Pertambangan

Pembiayaan sektor pertambangan terhadap PDRB sektor pertambangan memiliki pengaruh positif dan signifikan. Grafik di bawah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan menunjukkan bahwa posisi pembiayaan sektor pertambangan cenderung meningkat. Namun pembiayaan yang disalurkan di sektor pertambangan dan penggalian kecil karena besarnya risiko pembiayaan di sektor ini. Sektor pertambangan dan penggalian membutuhkan waktu yang panjang untuk dapat mengahasilkan nilai tambah, mulai kegiatan eksplorasi sampai eksploitasi membutuhkan waktu yang lama. Jadi pembiayaan di sektor pertambangan dan penggalian tidak bisa langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam waktu yang sama. Sehingga membutuhkan lag yang panjang dalam proses pertambangan dan penggalian.

Grafik 5.5 Pembiayaan Pertambangan oleh Perbankan Syariah di Jawa Timur

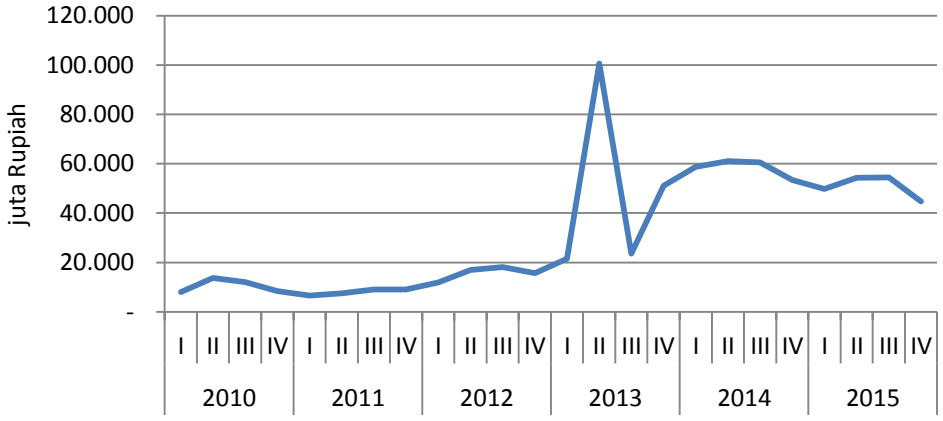

Jika ditilik lebih lanjut, pembiayaan untuk sektor pertambangan dan penggalian di Jawa Timur masih sangat kecil, yakni rata-rata Rp 32 milyar per tahun dengan prosentase 0,45% dari total pembiayaan se-Jawa Timur. Minimnya pendananaan dari perbankan syariah adalah akibat kurangnya pemahaman beberapa bank terhadap peluang, prospek usaha dan resiko pembiayaan sektor pertambangan. Selain itu, pembiayaan pada sektor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertambangan adalah investasi jangka panjang sementara dana perbankan pada umumnya berjangka pendek (*potensi mismach liquidity*).[11]

3. Pembiayaan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB sektor Industri Pengolahan

Dari hasil uji regresi sederhana yang dijelaskan di Bab IV, diperoleh hasil bahwa pembiayaan sektor industri pengolahan oleh perbankan syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor industri pengolahan. Hal ini linier dengan pembiayaan sektor industri pengolahan yang mencapai 13,67% dengan total pembiayaan Rp 971,9 milyar.

Grafik 5.6 Pembiayaan Industri Pengolahan oleh Perbankan Syariah di Jawa Timur

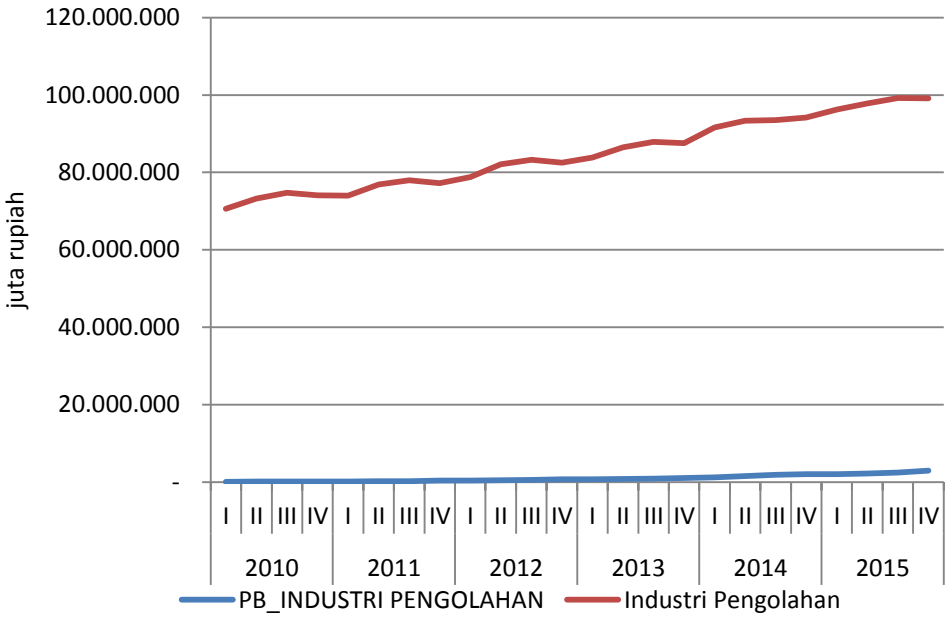

Grafik di atas menunjukkan bahwa knerja pembiayaan sektor industri pengolahan linier dengan PDRB sektor industri pengolahan yang sama-sama memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Hasil penelitian ini

[11] Widita Kurniasari, "Analisis Pengaruh Kredit..."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari, bahwa industri pengolahan merupakan sektor primadona Indonesia.[12]

4. Pembiayaan Sektor Konstruksi terhadap PDRB sektor Konstruksi

Pembiayaan sektor konstruksi memiliki pengaruh yag positif dan signifikan terhadap PDRB sektor konstruksi. Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang berperan penting pada proses pembangunan ekonomi di Jawa Timur, mengingat sektor ini mampu berkontribusi pada PDRB hingga 9%. Pembiayaan konstruksi di Jawa Timur didominasi oleh pembiayaan properti. Tingginya permintaan terhadap pembiayaan perumahan ini disambut baik oleh perbankan syariah dengan menghadirkan variasi-variasi pembiayaan yang *attractive.* Pembiayaan yang dialokasikan oleh perbankan kepada sektor ini juga cukup besar yakni mencapai 12,59% dengan rata-rata pembiayaan per tahun Rp 895 milyar. Jika dilihat melalui grafik di bawah, pembiayaan sektor konstruksi dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan.

Grafik 5.7 Pembiayaan Konstruksi oleh Perbankan Syariah di Jawa Timur

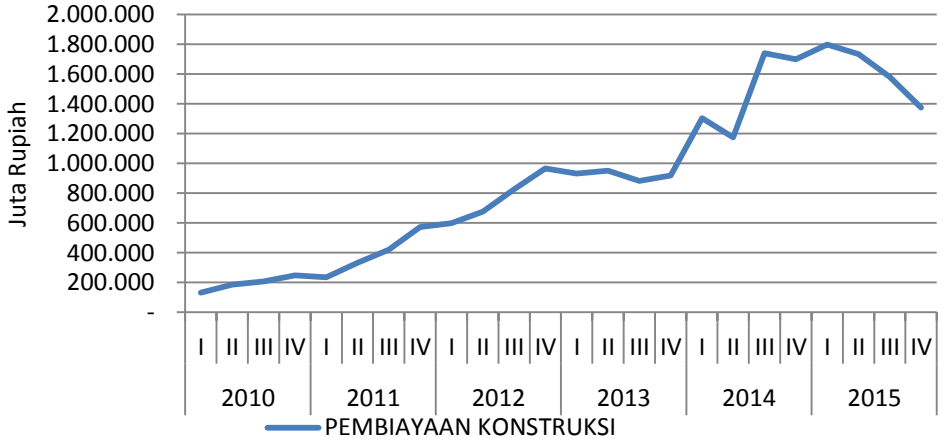

[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkembangan sektor konstruksi tidak saja hanya dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, akan tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan sosial politik baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebagai contoh, kebijakan penerapan otonomi daerah menyebabkan beralihnya pengelolaan proyek-proyek dari pusat ke daerah. Hal ini menyebabkan para pengusaha sektor konstruksi dan kontraktor banyak mengalihkan fokus usahanya ke daerah yang memiliki potensi pengembangan konstruksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id